

PENINGKATAN KAPASITAS WIRUSAHA MANDIRI MADU HUTAN MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA LAMBUSANGO

**Ahmad Muhardin Hadmar^{1*},
Noia Sakka Lebang², Risman
Togala³**

^{1,2,3}Program Studi Ilmu
Pemerintahan, Universitas
Sulawesi Tenggara

Article history

Received : 21 Juni 2025

Revised : 27 Oktober 2025

Accepted : 22 November 2025

Published : 3 Januari 2026

*Corresponding author

Email : ahmadmuhardin@gmail.com

No. doi:

<https://doi.org/10.24198/sawala.v7i1.64501>

ABSTRAK

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengembangan kewirausahaan menjadi tantangan utama dalam mengelola usaha madu hutan di Desa Lambusango. Meskipun madu hutan merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi, pemanfaatannya belum terorganisasi dan berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas wirausaha masyarakat mandiri melalui penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga pengelola usaha madu kolektif. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan simpulan. Kegiatan ini menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada lima tahapan (5P), yaitu: *enabling, strengthen, protect, support, dan keeping*. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran kolektif masyarakat dalam mengelola usaha madu hutan secara lebih terstruktur. BUMDes Lambusango berperan sebagai fasilitator kelembagaan, pemberi dukungan teknis, dan pelindung intensi berbisnis. Program ini berkontribusi dalam memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi alam dan mendorong terbentuknya sistem usaha desa yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Kata kunci: BUMDes, Desa Lambusango, Madu Hutan, Pemberdayaan Masyarakat, Wirausaha Mandiri

ABSTRACT

Lack of community understanding of entrepreneurship development is a major challenge in managing forest honey businesses in Lambusango Village. Although forest honey is a commodity with high economic value, its utilization has not been organized and sustainable. This community service activity aims to increase the capacity of independent community entrepreneurs by strengthening the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) as collective honey business management institutions. The method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques in the form of observation, interviews, documentation, and literature studies. Data analysis is carried out through the stages of reduction, presentation, and drawing conclusions. This activity uses a community empowerment approach based on five stages (5P), namely: *enabling, strengthening, protecting, supporting, and maintaining*. The results of the activity show an increase in knowledge, skills, and collective awareness of the community in managing forest honey businesses in a more structured manner. BUMDes Lambusango acts as an institutional facilitator, technical support provider, and protector of business intentions. This program contributes to strengthening the local economy based on natural potential and encouraging the formation of a sustainable and competitive village business system.

Key word: BUMDes, Lambusango Village, Forest Honey, Community Empowerment, Independent Entrepreneurship

PENDAHULUAN

Desa merupakan bagian terkecil dari pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berpusat pada potensi lokal (Falih et al., 2019). Namun, ketidakmampuan masyarakat untuk mengembangkan kewirausahaan secara mandiri merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan desa. Banyak sumber daya alam yang melimpah belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan kelembagaan yang mendukung ekonomi desa (Baskoro et al., 2022). Sehingga menyebabkan potensi ekonomi desa belum berkembang secara maksimal.

Fenomena ini terjadi di Desa Lambusango, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton. Desa Lambusango memiliki kekayaan sumber daya alam berupa madu hutan. Madu hutan dari Lambusango terkenal akan kualitasnya yang alami, karena dihasilkan dari kawasan hutan lindung yang masih terjaga keasriannya (Nurhasanah Sari & Rifkah Ansyarif, 2018). Namun demikian, masyarakat pencari madu di desa ini masih mengelola produksi secara tradisional, tanpa pendekatan kewirausahaan yang terarah. Madu dijual tanpa merek, dikemas seadanya, dan pemasarannya hanya dilakukan secara langsung di tingkat lokal, sehingga belum mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan (Purnamasari & Sabirawan, 2023).

Kondisi tersebut mencerminkan tantangan struktural yang dihadapi oleh masyarakat perdesaan dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam menjadi produk bernilai ekonomi tinggi (Hartini, 2018). Minimnya akses terhadap pelatihan kewirausahaan, teknologi pengolahan, dan jaringan pemasaran menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat masih bersifat subsisten (Falih et al., 2019; Nasir, 2017;

Prakoso & Oktora, 2023). Dalam perspektif pembangunan ekonomi lokal, peningkatan *value added* produk merupakan strategi penting dalam memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat (Nasir, 2017). Langkah ini mendorong transformasi dari sekadar penghasil bahan mentah menjadi pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing.

Dalam konteks tersebut, pengembangan nilai tambah produk tidak hanya menuntut inovasi dalam proses produksi, tetapi juga kemampuan adaptasi terhadap dinamika lingkungan dan pasar. Menurut Fatriani et al (2014) ketergantungan masyarakat pada musim berbunga dan kurangnya diversifikasi produk menjadi masalah lain yang cukup mendasar. Ketika kondisi alam tidak mendukung, pendapatan masyarakat akan menurun drastis. Selain itu, adanya inovasi dalam pengolahan lanjutan, seperti produk olahan madu, kosmetik berbahan dasar madu, atau kemasan komersial, membuatnya lebih sulit untuk dijual (Nurrahmi et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat untuk berwirausaha secara mandiri masih belum optimal dibangun.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi desa yang dibentuk untuk mengelola potensi lokal secara kolektif, profesional, dan berkelanjutan (Hidayah et al., 2020). Lembaga ini menjadi instrumen penting dalam mendorong transformasi usaha masyarakat dari skala individu ke arah kelembagaan kolektif. Melalui BUMDes, potensi lokal seperti madu hutan dapat dikembangkan menjadi usaha desa yang memiliki sistem pengelolaan, standar kualitas produk, dan akses pasar yang lebih baik (Wahyudi & Nuddin, 2019). Namun, pemanfaatan BUMDes dalam pengembangan usaha di Desa masih sangat terbatas (Ali et al., 2019).

Upaya peningkatan kapasitas wirausaha mandiri madu hutan melalui BUMDes perlu dilakukan secara terstruktur

dan partisipatif. Masyarakat perlu difasilitasi melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan usaha agar memiliki pengetahuan dalam mengelola usaha secara modern (Saputra, 2025). Upaya ini tidak hanya menasar aspek teknis produksi, tetapi juga mencakup manajemen usaha, pengemasan produk, branding, serta pemanfaatan media digital untuk pemasaran (Hidayah et al., 2020).

Dalam perspektif pemberdayaan, penguatan wirausaha mandiri berarti meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya secara mandiri. Menurut Handajani et al (2021), pemberdayaan ekonomi harus menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang memiliki kontrol atas keputusan dan tindakan yang diambil. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dalam pengembangan ekonomi desa. Dengan demikian, usaha madu hutan tidak hanya menjadi penghasil alternatif, tetapi berkembang sebagai sumber ekonomi utama desa.

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan teori 5P Edi Suharto, yaitu: pemungkinan (*enabling*), penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), penyokongan (*supporting*), dan pemeliharaan (*maintaining*) (Putra et al., 2016). Pemungkinan dilakukan melalui edukasi untuk membuka wawasan masyarakat akan potensi ekonomi madu hutan. Penguatan diarahkan pada peningkatan keterampilan manajemen usaha. Perlindungan mencakup penguatan kelembagaan BUMDes sebagai pelindung dan fasilitator usaha. Penyokongan diwujudkan melalui pendampingan usaha, dan pemeliharaan difokuskan pada strategi keberlanjutan usaha madu dalam jangka panjang (Pathony, 2020).

Dengan demikian, peningkatan kapasitas wirausaha mandiri madu hutan melalui BUMDes diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha desa yang lebih berdaya saing. Selain memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, kegiatan ini juga memperkuat fungsi kelembagaan desa dalam pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal (Handajani et al., 2021). Melalui kegiatan ini, diharapkan Desa Lambusango dapat tumbuh menjadi desa yang mandiri

secara ekonomi, produktif secara kelembagaan, serta berkelanjutan secara ekologi.

KAJIAN PUSTAKA

Pengembangan kapasitas wirausaha mandiri di tingkat desa merupakan bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal (Fauziah et al., 2025). Pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya mereka secara mandiri. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas mencakup keterampilan teknis selain pengetahuan tentang kewirausahaan, pengelolaan usaha, dan kemampuan untuk membaca peluang pasar. Menurut Handajani et al (2021), tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk memberi masyarakat kemampuan untuk berkembang secara mandiri.

Wirausaha mandiri menjadi konsep penting dalam membangun ekonomi lokal. Seorang wirausaha mandiri tidak hanya memiliki kemampuan dalam menciptakan dan mengelola usaha, tetapi juga berani mengambil risiko, memiliki visi, serta mampu melihat potensi lokal sebagai peluang usaha (Zimmerer & Scarborough, 2005). Dalam sektor perdesaan, pengembangan wirausaha berbasis sumber daya alam seperti madu hutan, hasil hutan bukan kayu, dan produk olahan lainnya menjadi alternatif yang menjanjikan untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan membuka lapangan kerja baru.

Dalam membangun ekonomi lokal, konsep wirausaha mandiri sangat penting. Pelaku wirausaha mandiri tidak hanya memiliki kemampuan untuk mendirikan dan mengelola usaha, tetapi mereka juga berani mengambil risiko, memiliki visi, dan dapat melihat peluang usaha di sekitar mereka (Saputra, 2025). Pengembangan bisnis yang bergantung pada sumber daya alam seperti madu hutan, hasil hutan bukan kayu, dan produk olahan lainnya menjadi alternatif yang menjanjikan dalam sektor perdesaan untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan membuka lapangan kerja baru.

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga ekonomi desa yang bertujuan untuk mengelola usaha dan

potensi desa secara kolektif dan partisipatif (Hartini, 2018). Dalam Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015, BUMDes dimandatkan untuk menjalankan kegiatan ekonomi, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa jika dikelola secara profesional, transparan, dan berbasis potensi lokal. Penelitian Mutia Basri et al (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan BUMDes sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan kejelasan arah usaha.

Sebagai produk hasil hutan bukan kayu, madu hutan memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan wirausaha desa (Dzikron, 2024). Madu alami sangat diminati pasar karena nilai kesehatannya yang tinggi, terutama jika dikemas dan dipasarkan secara menarik. Permana (2020), menyatakan bahwa akses ke pemasaran digital, bimbingan produksi, dan pelatihan dapat membantu wirausaha pencari madu. Hal ini sejalan dengan penelitian Baskoro et al (2022), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi desa sangat dipengaruhi oleh integrasi sumber daya alam dan kapasitas kewirausahaan masyarakat.

Strategi pemberdayaan melalui lima pendekatan utama sebagaimana dikemukakan oleh Edi Suharto (dalam Putra et al., 2016) juga menjadi rujukan dalam pengembangan kapasitas masyarakat. Kelima pendekatan tersebut adalah pemungkinan (*enabling*), penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), penyokongan (*supporting*), dan pemeliharaan (*maintaining*). Melalui konsep ini, masyarakat dimotivasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi desa.

Selain itu, studi oleh Haryadi & Suryanto (2021) mengenai peran kelembagaan desa dalam mendukung usaha rakyat menunjukkan bahwa peran BUMDes sangat strategis dalam membantu petani madu atau pencari madu untuk mengakses modal, memperluas jaringan distribusi, serta membangun merek produk secara komunal. Dalam praktiknya, integrasi kelembagaan ini membutuhkan perencanaan partisipatif, pendampingan berkelanjutan, dan kolaborasi antara

akademisi, pemerintah desa, dan masyarakat itu sendiri.

Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Fadilla & Marliza (2022) tentang BUMDes memiliki peran dalam mendukung pengembangan usaha rakyat. Lembaga ini memainkan peran yang sangat strategis dalam membantu petani madu atau pencari madu mendapatkan modal, memperluas jaringan distribusi, dan membangun merek produk komunal (Purnamasari & Sabirawan, 2023). Dalam kenyataannya, integrasi kelembagaan ini membutuhkan partisipasi aktif, pendampingan yang berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kapasitas wirausaha mandiri madu hutan melalui penguatan kelembagaan BUMDes merupakan pendekatan yang tepat dalam menjawab tantangan ekonomi lokal di Desa Lambusango. Sinergi antara potensi sumber daya alam, kapasitas masyarakat, dan kelembagaan ekonomi desa akan menciptakan ekosistem usaha berkelanjutan.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Prakoso & Oktora (2023) metode ini dapat menggambarkan secara mendalam kondisi, perilaku, atau fenomena sosial yang terjadi sesuai dengan kondisi lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran mengenai proses peningkatan kapasitas wirausaha mandiri masyarakat melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan usaha madu hutan. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Lambusango, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton. Desa ini dipilih karena potensi ekologisnya sebagai penghasil madu hutan alami dan kondisi sosial-ekonominya, yang masih menghadapi beberapa kendala dalam pengelolaan usaha secara kolektif dan berkelanjutan. Untuk mendorong kemandirian dalam merancang, melaksanakan, dan mengelola usaha secara berkelanjutan, kegiatan ini dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek utama.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap praktik usaha masyarakat, wawancara mendalam dengan pencari madu dan pengurus BUMDes, dokumentasi visual dan tertulis, serta studi pustaka (Pathony, 2020). Teori pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan oleh Edi Suharto (dalam Putra et al., 2016), menekankan lima pilar pemberdayaan, yaitu: pemungkinan (*enabling*), penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), penyokongan (*supporting*), dan pemeliharaan (*maintaining*). Seluruh data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk mengungkap sejauh mana peningkatan kapasitas masyarakat dan efektivitas peran BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi lokal di Desa Lambusango.

Tahapan pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemungkinan (*enabling*), masyarakat Desa Lambusango diberi sosialisasi untuk menyadari potensi madu hutan serta pentingnya peran BUMDes dalam pengelolaannya.
2. Penguatan (*empowering*), pelatihan dasar *disgn brand*, manajemen usaha, dan pengolahan madu hutan melalui konsep wirausaha mandiri.
3. Perlindungan (*protecting*): memfasilitasi penguatan kelembagaan melalui BUMDes Lambusango.
4. Penyokongan (*supporting*): pendampingan dalam aspek produksi, pemasaran, dan akses pasar melalui dukungan teknis serta jejaring kemitraan usaha madu.
5. Pemeliharaan (*maintaining*): upaya keberlanjutan dilakukan melalui monitoring berkala, pembinaan usaha, dan pengembangan strategi jangka panjang melalui BUMDes Lambusango.

Berdasarkan tahapan diatas, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan konsep pemberdayaan melalui lembaga BUMDes Lambusango.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Lambusango, Kecamatan Kapontori,

Kabupaten Buton, difokuskan pada upaya peningkatan kapasitas wirausaha mandiri madu hutan melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan ini menerapkan pendekatan 5P sebagaimana dikembangkan oleh Edi Suharto (Putra et al., 2016), yang mencakup tahapan: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek kelembagaan, partisipasi, keberlanjutan, dan kemandirian ekonomi desa. Berikut ini merupakan uraian hasil dan temuan pada setiap tahapan.

1. Pemungkinan (*Enabling*)

Tahap awal pelaksanaan kegiatan dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat Desa Lambusango untuk menggugah kesadaran akan potensi besar madu hutan sebagai sumber ekonomi yang bernilai tinggi. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan warga, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta penyampaian informasi mengenai manfaat ekonomi, ekologi, dan sosial dari usaha madu hutan.



Gambar 1. Sosialisasi potensi Madu Hutan serta peran BUMDes

Berdasarkan temuan lapangan, masyarakat telah memiliki pengetahuan dasar mengenai pencarian madu hutan secara turun-temurun, namun belum memandangnya sebagai suatu bentuk usaha produktif yang bisa dikelola secara sistematis. Dalam kegiatan ini, tim pengabdian juga memperkenalkan pentingnya peran kelembagaan desa, khususnya BUMDes Lambusango. Lembaga ini menjadi entitas pengelola usaha desa yang dapat menampung, melindungi, dan mengembangkan usaha madu secara kolektif. Respon masyarakat sangat positif, terutama setelah dijelaskan potensi

keuntungan jangka panjang dari usaha madu apabila dikelola secara bersama dan terorganisir.

Sebagai bentuk penguatan, tim melakukan pendampingan teknis pengemasan madu menggunakan botol kaca higienis, memberikan pelatihan desain label dan identitas merek produk, serta memfasilitasi kerja sama antara BUMDes dan kelompok pencari madu untuk penyediaan kemasan dan pemasaran bersama. Respon masyarakat sangat positif, terutama setelah dijelaskan potensi keuntungan jangka panjang dari usaha madu apabila dikelola secara bersama dan terorganisir. Upaya ini sekaligus menandai pergeseran paradigma masyarakat dari aktivitas tradisional berbasis kebutuhan subsisten menuju pengelolaan usaha yang produktif, kolaboratif, dan berorientasi pasar.

2. Penguatan (empowering)

Dalam praktiknya, masyarakat masih menggunakan botol bekas air mineral atau jerigen sebagai wadah madu, yang rawan terhadap kontaminasi dan menurunkan daya tarik produk. Gambar 2 dibawah ini menunjukkan kemasan madu hutan lambusango yang dikemas menggunakan botol bekas.



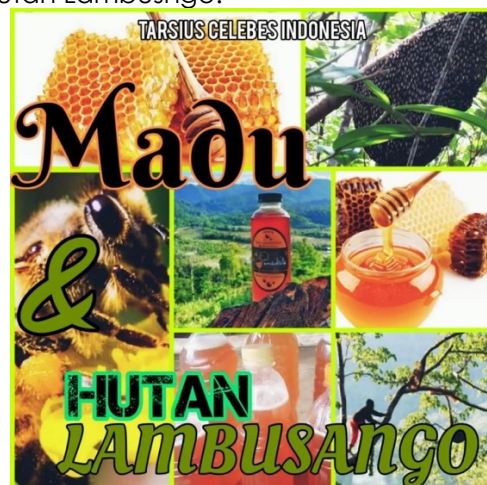
Gambar 2. Produk Madu Hutan yang dipasarkan oleh Pengusaha di Desa Lambusango

Kemasan tersebut masih bersifat sederhana dan belum memenuhi standar keamanan serta estetika produk, sehingga berpengaruh terhadap nilai jual dan kepercayaan konsumen. Kondisi ini mencerminkan perlunya peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal pengemasan dan branding produk sebagai bagian dari strategi penguatan usaha madu hutan yang berdaya saing (Gambar 2).

Tahapan kegiatan selanjutnya adalah pemberian pelatihan teknis dan non-teknis kepada masyarakat di Desa Lambusango. Penguatan yang dilakukan meliputi pelatihan pengemasan madu menggunakan botol kaca higienis sebagai pengganti kemasan plastik sebelumnya, serta pendampingan dalam desain label dan branding produk agar memiliki identitas komersial yang menarik. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan pelatihan dasar manajemen produksi dan pemasaran digital, termasuk pemanfaatan media sosial untuk promosi. Langkah-langkah ini menjadi bentuk konkret dari upaya peningkatan kapasitas kewirausahaan dan profesionalisme masyarakat dalam mengelola madu hutan secara berkelanjutan.

Materi pelatihan meliputi dasar-dasar desain kemasan dan label produk (branding), manajemen usaha kecil, pencatatan keuangan sederhana, serta teknik pengolahan dan pengemasan madu hutan. Peserta pelatihan berasal dari berbagai kelompok pencari madu yang telah lama beraktivitas namun belum memiliki pengetahuan kewirausahaan. Melalui pelatihan, peserta belajar pentingnya kebersihan, estetika, dan keamanan produk untuk meningkatkan nilai jual. Mereka juga dikenalkan dengan konsep harga pokok produksi, margin keuntungan, dan strategi pemasaran lokal maupun digital. Beberapa peserta mulai mengembangkan label lokal sederhana yang mencantumkan nama produk, asal desa, dan kontak yang dapat dihubungi.

Berikut ini dokumentasi potensi Madu Hutan Lambusango.



Gambar 3. Madu Asli Hutan Lambusango

3. Perlindungan (*protecting*)

Upaya perlindungan dilakukan melalui penguatan kelembagaan usaha madu dengan memfasilitasi pembentukan kelompok usaha berbasis BUMDes Lambusango. Sebelumnya, kegiatan pencarian madu dilakukan secara individu atau kelompok kecil tanpa struktur formal dan sangat rentan terhadap konflik internal, ketidakadilan pembagian hasil, serta ketidakteraturan proses panen.



Gambar 3. Penguatan Kelembagaan Pengusaha Madu Hutan Lambusango melalui BUMDes

Gambar 3 diatas menunjukkan proses penguatan kelembagaan yang dilakukan bersama BUMDes Lambusango. Pendampingan dilakukan untuk menyusun aturan internal kelompok, mekanisme pembagian hasil, serta jadwal panen yang disepakati bersama. Selain itu, tim pengabdian membantu menghubungkan kelompok usaha madu dengan perangkat desa dan pengurus BUMDes agar bisa dimasukkan dalam unit usaha resmi desa. Selain itu, dilakukan pendampingan awal untuk pengurusan izin edar sederhana dan pendaftaran merek lokal.

Meskipun respon masyarakat positif, mereka masih menghadapi sejumlah kendala dalam pengelolaan usaha madu. Permasalahan utama meliputi keterbatasan kemampuan manajerial, belum adanya aturan kelembagaan yang jelas, serta rendahnya akses terhadap permodalan dan pasar. Selain itu, masyarakat belum memiliki izin edar dan merek dagang resmi, sehingga produk madu Lambusango sulit bersaing dan rentan terhadap pemalsuan di pasaran.

4. Penyokongan (*supporting*)

Tahapan penyokongan merupakan fase intensif pendampingan teknis terhadap kelompok usaha yang telah terbentuk. Kegiatan ini meliputi asistensi dalam proses

produksi, peningkatan kapasitas pengemasan, serta strategi pemasaran berbasis komunitas dan digital. Berikut ini merupakan gambar hasil pengemasan madu hutan lambusango menggunakan nama produk yang lebih modern.



Gambar 4. Kemasan baru Madu Hutan Lambusango (MADUTA)

Gambar 4 di atas menunjukkan inovasi kemasan baru produk madu hutan Lambusango. Kemasan ini merupakan hasil produksi salah satu pelaku usaha lokal sebagai bagian dari upaya peningkatan nilai jual produk dengan merek MADUTA. Madu hutan Lambusango telah dikenal secara informal oleh masyarakat di wilayah Buton dan sekitarnya, namun belum memiliki daya saing yang kuat di pasar luar daerah. Melalui kegiatan pendampingan, masyarakat didorong untuk meningkatkan kualitas kemasan dan citra produk, sehingga menumbuhkan kepercayaan diri dalam memasarkan produk dengan harga yang wajar serta mampu bersaing dengan produk sejenis dari luar daerah. Selain itu, tim pengabdian juga melakukan identifikasi peluang kemitraan dengan koperasi dan pelaku UMKM di wilayah lain.

5. Pemeliharaan (*maintaining*)

Tahap terakhir berfokus pada upaya menjaga keberlanjutan hasil pengabdian. Tim melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kelompok usaha madu hutan, termasuk capaian produksi, kendala dalam distribusi, serta perkembangan kerja sama kelembagaan. Dari hasil evaluasi, diketahui bahwa beberapa peserta mulai menerapkan pencatatan keuangan harian dan mencoba sistem pembagian keuntungan secara adil di tingkat kelompok. Gambar dibawah ini menampilkan proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan bersama BUMDes Lambusango.



Gambar 5. Monitoring dan Evaluasi melalui BUMDes Lambusango

Setelah melalui tahapan monitoring dan evaluasi, BUMDes Lambusango mulai dibimbing dalam mulai menyusun rencana pengembangan unit usaha madu sebagai salah satu program prioritas desa. Sebagai langkah lanjutan, dirancang pelatihan tingkat lanjut untuk mengolah madu hutan menjadi produk lain, misalnya seperti sabun madu, masker alami, dan produk herbal. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi dalam menciptakan rantai nilai madu yang tidak hanya berhenti pada produksi mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk olahan bernilai tambah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian di Desa Lambusango, terlihat adanya peningkatan kapasitas wirausaha mandiri pada pengusaha madu hutan. Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan konsep 5P (pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan) terbukti efektif dalam pelaksanaannya. Masyarakat menunjukkan peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran berwirausaha secara kolektif melalui integrasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi alam yang dikelola secara berkelanjutan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan tidak hanya mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis masyarakat dalam mengelola usaha madu, tetapi juga memperkuat kelembagaan lokal melalui integrasi usaha ke dalam struktur BUMDes Lambusango.

Kegiatan ini juga memperlihatkan adanya korelasi positif antara peningkatan kapasitas usaha dan partisipasi masyarakat dalam kelembagaan ekonomi desa. Melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi akses pasar, masyarakat mulai mengadopsi pendekatan wirausaha yang lebih sistematis, memahami nilai produk, dan menunjukkan upaya konkret menuju keberlanjutan usaha. Namun, hingga saat ini masyarakat masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan modal kerja, rendahnya kemampuan pengelolaan administrasi usaha, keterbatasan akses pasar digital, serta belum tersedianya izin edar dan sertifikasi produk yang menjadi syarat untuk memperluas jangkauan pemasaran. Dengan demikian, kegiatan ini telah memberikan kontribusi dalam penguatan ekonomi lokal yang berbasis pada potensi alam dan kearifan lokal masyarakat Desa Lambusango.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I. I., Sutarna, I. T., Abdullah, I., Kamaluddin, K., & Mas'ad, M. (2019). Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat. *Sosiohumaniora*, 21(3), 349–354. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23464>
- Baskoro, H., Sukaris, S., & Ismanto, H. (2022). Penyuluhan Manajemen Usaha Dalam Mendukung Usaha Bumdes Desa Prupuh. *DedikasiMU: Journal of Community Service*, 4(2), 198. <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v4i2.3993>
- Dzikron, M. (2024). *Pemberdayaan Perempuan Melalui Wirausaha Mandiri Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga*. November.
- Fadilla, F., & Marliza, Y. (2022). Pelatihan Pembukuan Sederhana Dalam Upaya Meningkatkan Usaha BUMDes. *Jurnal Pengabdian*, 1(2), 57–64. <https://journal.bengkuluinstitute.com/index.php/jp/article/view/24%0Ahttps://journal.bengkuluinstitute.com/index.php/jp/article/download/24/19>
- Falih, M. S. H. Al, Rizqi, R. M., & Ananda, N. A. (2019). *Pengelolaan Keuangan Dan Pengembangan Usaha Pada Usaha*

- Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Vol.2 No.(1), 2.
- Fatriani, Rezekiah, A. A., & Fitriani, A. (2014). Analisa Usaha Lebah Madu Hutan Dan Kualitasnya. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Fauziah, D. A., Khoir, F., Sa, U., Rizky, M., Amri, S., & Tri, L. (2025). Pemberdayaan Wirausaha Mandiri Keluarga dalam Mendukung Kewirausahaan Berkelanjutan di Kelurahan Geluran Sidoarjo. 5(1), 105–113. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v5i1.3255>
- Handajani, L., Abidin, Z., & Pituringsih, E. (2021). Pendampingan Perintisan Usaha Bumdes Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Peteluan Indah. *Abdi Insani*, 8(1), 10–17. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v8i1.362>
- Hartini, K. (2018). Identifikasi Kelayakan Usaha BUMDes Pada Aspek Sosial dan Ekonomi (Studi Kasus BUMSes Mekar Sari Mandiri Desa Mekar Sari Kabupaten Kepahiang). *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Hidayah, U., Mulatsih, S., & Purnamadewi, Y. L. (2020). Pemilihan Unit Usaha Bumdes Harapan Jaya Sesuai Dengan Potensi Lokal Di Desa Pagelaran. *Jurnal Benefita*, 5(1), 101. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4274>
- Mutia Basri, Y., Desti Marianti, T., & Rofika, R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 34–50. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379>
- Nasir, H. (2017). Penguatan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan melalui UMKM dan Koperasi dalam Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Sospol*, 3(2), 122–138.
- Nurhasanah Sari, D., & Rifkah Ansyarif, A. (2018). Karakteristik Madu Hutan Lenah Apis Dorsata Daerah Sulawesi Tenggara Ditinjau Dari Sifat Fisika-Kimia. *Cokroaminoto Journal of Chemical Science*, 5(2), 42–46.
- Nurrahmi, M., Saepudin, R., & Zain, B. (2019). Strategi Pemasaran Madu Hutan di Kota Bengkulu. *Mapetari*, 4(1), 13–20. <https://doi.org/10.35989/mapetari.v4i1.2>
- Pathony, T. (2020). Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang. *Ijd-Demos*, 1(2), 262–289. <https://doi.org/10.31506/ijd.v1i2.23>
- Permana, I. (2020). Kinerja Usaha BUMDES di Kabupaten Bekasi Dipengaruhi oleh Orientasi Kewirausahaan, Teknologi Digital, Kewirausahaan dan Motivasi Usaha. 1(2), 11–18.
- Prakoso, A. S., & Oktora, Y. S. (2023). Penerapan Pendampingan Mahasiswa Disabilitas Untuk Menjadi Wirausaha Mandiri. *Journal Community Service Consortium*, 3(1), 21–28. <https://doi.org/10.37715/consortium.v3i1.3644>
- Purnamasari, W. O. D., & Sabirawan, A. (2023). Strategi Pengembangan Usaha Madu Di Desa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton: Indonesia. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 9(1), 192–199.
- Putra, A. A. S., Wisadirana, D., & Mochtar, H. (2016). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Lebah Madu Kelompok Tani Tahura (KTT) (Studi Kasus di Desa Dilem Kecamatan Gondang Mojokerto). *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 19(01), 36–45. <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2016.019.01.5>
- Saputra, J. (2025). Pemberdayaan Anggota dan Pengurus Koperasi Perempuan Wirausaha Mandiri Kota Jambi melalui Pelatihan Koperasi Berbasis Digital Menuju Koperasi Modern. 4(1), 30–39. <https://doi.org/10.55123/abdikan.v4i1.4863>
- Wahyudi, D. P., & Nuddin, A. (2019). Pengembangan Kelompok Usaha Madu Hutan Di Desa Pappandangan, Polewali Mandar Melalui Program Kemitraan Masyarakat. *Jurnal Dedikasi Masyarakat*, 2(2), 44. <https://doi.org/10.31850/jdm.v2i2.381>